



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém

Conceição Savio, E. da

Citation

Conceição Savio, E. da. (2016, January 28). *Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/37552>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/37552>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/37552> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Conceição Savio, Edegar da

Title: Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém

Issue Date: 2016-01-28

BAB 2

Politik bahasa di Timor-Leste dan Distrik Lautém

2.1 Pendahuluan

Wilayah Nusantara Timur – suatu istilah yang diperkenalkan oleh James J. Fox (Engelenhoven, 2006) yang mencakup seluruh Indonesia Timur dan Timor-Leste – bertradisi lama terhadap penelitian linguistik yang dimulai kurang lebih dengan sketsa G. Heijmering (1846) mengenai bahasa Leti yang ditambahi daftar kata komparatif bahasa Roti, Helong, Dawan (sekarang ini disebut bahasa Uab Meto di Indonesia dan Baikenu di Timor-Leste) dan dialek Tetun Belu.

Kepentingan utama pada hari awal penelitian linguistik wilayah Nusantara Timur ini adalah penentuan perbatasan yang disebut *Oostersche afdeeling* ('Bagian Timur') dalam Hindia-Belanda. Perbatasan baratnya – yang dinamakan garis Brandes – berjalan di sebelah barat dari pulau Roti, di selatan antara Flores Timur dan pulau Solor, melewati bagian timur Pulau Buton, terus melewati kepala burung di Papua bagian utara. Dalam tesis S3 beliau, J.L.A Brandes (1884) membedakan Bagian Barat daripada Bagian Timur berdasarkan perbedaan konstruksi posesif (milik – pemilik di Bagian Barat (seperti dalam bahasa Indonesia) versus pemilik – milik di Bagian Timur (seperti di bahasa Fataluku). Brandstetter (1911) mengadopsi kriteria tipologi ini untuk *Grenzdistrikte im Osten* (Distrik perbatasan timur), tetapi Jonker (1914) sangat tidak mengaku fenomena ini sebagai kriteria untuk linguistik historis di wilayah tersebut. Ada kesadaran bahwa wilayah Nusantara Timur sebenarnya mempunyai dua rumpun bahasa yang berbeda, keluarga Austronesia dan keluarga 'nonAustronesia'. Bahasa nonAustronesia sering disebut bahasa Papua. Schapper, Huber & Engelenhoven (2012) membuktikan hubungan genetik antara bahasa nonAustronesia di Pulau Timor dan bahasa kepulauan Alor-Pantar di sebelah utara Pulau Timor.

2.2 Politik bahasa sebelum tahun 1999

Baru pada akhir Perang Dunia Kedua Portugal mulai tertarik pada Pulau Timor bagian timur. Seperti terbayang dalam tinjauan literatur Hull (1998), baru pada sekitar awal abad ke-20, misionaris Katolik mulai mempelajari bahasa lokal Timor bagian timur, misalnya Kamus Portugis-Tetun dari Fr. Sebastião da Silva (1889) dan sketsa tata bahasa Galoli dan Kamus Portugis-Galoli dari Fr. Manuel da Silva (1900, 1905).

Taylor-Leech (2009) menjelaskan bahwa ketertarikan awal terhadap bahasa lokal ini semata-mata untuk mendukung penyebaran agama Katolik antara penduduk Timor Portugis. Kemudian pada abad ke-20, kebijakan kolonial berfokus pada penciptaan populasi berbahasa Portugis yang memandang dirinya sebagai bangsa Portugis. Hull (1998:15) menunjukkan bahwa sebenarnya upaya studi bahasa Tetun waktu itu bermaksud menyesuaikan militer Portugis dengan bahasa *lingua franca* lokal. Begini, bahasa

Portugis dapat disebarakan antara orang Timor Portugis dan menggantikan bahasa lokal. Hal ini digambarkan secara jelas pada belakang cetakan ulang tahun 1964 buku pertama Fr. Abílio Fernandes *Pequeno método práctico para aprender o tétun* ('metode praktis yang kecil untuk belajar bahasa Tetun'):

'Publikasi karya ini tidak berarti bahwa Komando ini telah mengabaikan perintahnya mengenai kebutuhan kami mengusahakan rakyat Timor Portugis belajar bahasa Portugis. ... akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dan persahabatan awal mereka (=orang Timor Portugis, EdC) kalau mereka mendengar kata simpati serta kata bersemangat dalam bahasa mereka sendiri dari prajurit metropolitan.

Dalam koeksistensi masa depan kita, penggantian progresif bahasa Tetun dengan bahasa Portugis harus dianggap sebagai tugas oleh prajurit, pertama dalam kata yang paling sering digunakan, kemudian dalam ekspresi dasar, sampai percakapan fasih mungkin (dalam bahasa Portugis, EdC).' (menurut penterjemahan bahasa Inggris Hull, 1998:15)

Engelenhoven (2006) menjelaskan bagaimana kebijakan bahasa kolonial Portugis menciptakan sebuah 'diglosia yang diperluas' à la Fishman (1967) di Timor Portugis, tempat bahasa lokal berfungsi sebagai versi yang rendah, sedangkan bahasa Portugis berfungsi sebagai versi yang tinggi dalam domain formal seperti administrasi, edukasi dan agama (Katolik). Perpindahan administrasi dari Lifau di Oecusse ke Dili pada tahun 1769 memungkinkan munculnya bahasa Tetun sebagai *lingua franca* untuk komunikasi antaretnis. Versi bahasa Tetun ini terutama digunakan di pasar (sehingga namanya *Tetun-Prasa* 'Tetun pasar' atau *Tetun-Dili*) dan berbeda dari bahasa Tetun tradisional (misalnya Tetun-terik) karena ketidakadaannya ragam bahasa khusus untuk urusan ritual. Oleh sebab itu penggalakan bahasa Tetun-Dili dengan pengorbanan bahasa Tetun 'tradisional' menciptakan situasi bahasa ritual dikeluarkan dari masyarakat kolonial Timor Portugis ke dalam eksklusivitas kelompok ethnolinguistik. Taylor-Leech (2005) menginformasikan bahwa kebijakan Portugis kurang lebih berlanjut pada tahun 1975 ketika Timor Portugis merdeka.

Engelenhoven (2006) menjelaskan bagaimana persepsi diri terkini masyarakat Timor berkembang di kalangan intelektual gerakan perlawanan selama pendudukan Indonesia. Hal ini dapat menjelaskan bahwa filsafat Mauberisme terhadap demokrasi sosial oleh Ramos-Horta sangat mirip filsafat Marhaenisme terhadap penindasan bangsa seperti yang diperkembang oleh Sukarno, presiden pertama Republik Indonesia.

Pilihan bahasa Tetun-Dili sebagai model bahasa nasional memperlihatkan alasan yang sama dengan pilihan bahasa Melayu – yang namanya diganti menjadi bahasa Indonesia – sebagai bahasa nasional Indonesia. Baik bahasa Melayu dan bahasa Tetun-Dili ada sejarah panjang sebagai *lingua franca* dan seperti bahasa Melayu, bahasa Tetun-Dili tidak terkait dengan kelompok etnis tertentu. Sedangkan bahasa Melayu sudah ada tradisi sastra yang mengkonsolidasikan posisinya sebagai bahasa nasional, bahasa Tetun-Dili tidak ada tradisi seperti itu. Fakta ini bertentangan dengan karakteristik sosiolinguistik penting dalam diglosia: warisan sastra bahasa nasional (Engelenhoven & Naerssen sedang dicetak).

Engelenhoven (2006) menjelaskan bahwa ialah terutama pelanggaran warisan sastra yang merupakan motivasi pilihan bahasa Portugis sebagai bahasa nasional program FRETILIN 1974.

Selama pendudukan Indonesia 1976-1999, Timor Timur sebagai provinsi termuda Republik Indonesia menganut filsafat Negara Pancasila dengan prinsip ketiga, Persatuan Indonesia, sebagai salah satu prinsip yang paling penting. Bahasa Indonesia didefinisikan dalam filsafat Negara sebagai tanda resmi identitas kesatuan Indonesia, dan bahkan ditentukan sebagai bahasa tunggal dalam kehidupan masyarakat di Timor bagian timur yang namanya diganti menjadi Timor Timur, propinsi ke-27 Republik Indonesia.

Seperti penghapusan bahasa Belanda dari masyarakat Indonesia dulu, pemerintah Indonesia melarang penggunaan bahasa Portugis dalam masyarakat Timor Timur sebagai sisa penjajahan. Hull (1999) menjelaskan bahwa karena strategi asimilasi kultural pemerintah kolonial Portugis, bahasa Portugis telah menjadi bagian integral kehidupan masyarakat Timor Portugis, sedangkan bahasa Belanda tidak pernah mencapai posisi yang sebanding di Hindia-Belanda. Oleh karena itu Bahasa Indonesia menggantikan bahasa Portugis sebagai bahasa liturgi dalam misa Katolik Roma. Fakta gereja Katolik Timor Timur langsung di bawah administrasi Vatikan pada tahun 1977, karena pengunduran diri uskup Portugis José Joaquim Ribeiro, memungkinkan penerus sementara di Timor Timur, uskup Martinho da Costa Lopes, mengatur supaya Vatikan mengakui bahasa Tetun daripada bahasa Indonesia, sebagai bahasa liturgi resmi di propinsi baru (Lennox, 2000).

Engelenhoven (2006) juga menjelaskan bahwa larangan Indonesia untuk memakai bahasa Portugis membuatnya menjadi bahasa perlawanan bawah tanah, sedangkan fungsi liturgis bahasa Tetun membuatnya menjadi bahasa perlawanan ‘di atas tanah’.

2.3 Politik bahasa sesudah tahun 1999

Selama Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Transitional Administration of the United Nations/UNTAET*) (1999-2002), kebijakan politik bahasa yang pada awalnya dikembangkan dalam program FRETILIN mulai diberlakukan. Walaupun pada awalnya cuma bahasa Portugis diakui sebagai bahasa resmi di negara baru Timor-Leste, terus dengan cepat bahasa Tetun-Dili diusulkan sebagai model untuk *Tetun Ofisiál* ‘bahasa Tetun resmi’, yang menciptakan sebuah kerangka pengakuan kedua bahasa sebagai bahasa resmi dalam Konstitusi.

Engelenhoven (2006) menyebutkan tiga persyaratan diglosia berkaitan yang melemahkan status resmi *Tetun Ofisiál*: 1) warisan sastra, 2) prestise, 3) stabilitas. Untuk mengatasi bahaya tersangka penolakan *Tetun Ofisiál* sebagai bahasa resmi, Menteri Pendidikan waktu itu, Dr. Filomeno Abel Jacob mendirikan *Instituto Nacional de Linguística* (INL, ‘Institut Nasional Linguistik’) yang tugas utamanya adalah standarisasi bahasa Tetun-Dili ke *Tetun Ofisiál*. INL merancang sebuah ortografi standar, *ortografia patronizada* ‘ejaan standar’, yang pada tingkat pemerintah menjadi ortografi resmi untuk bahasa Tetun resmi dan secara *default* menjadi dasar semua ortografi yang akan dikembangkan untuk semua bahasa nasional. 150 Tahun inovasi ejaan bahasa Tetun yang dihasilkan dalam *ortografia patronizada* adalah cara Timor-Leste untuk memenuhi persyaratan warisan sastra (*Instituto Nacional de Linguística*, 2002).

Persyaratan prestise dipenuhi oleh publikasi kamus monolingual pertama bahasa Tetun tahun 2005 di INL. Sebelum publikasinya, Kamus bahasa Tetun Standar Hull (2000) dan Dicionário Tetum-Português Costa (2000) sudah dipublikasikan. Meskipun INL berusaha menghasilkan kamus monolingual dan berbagai jenis daftar kata bilingual (antara lain *Disionáriu Malaiu-Tetun* ‘Kamus Melayu-Tetun’¹ untuk guru dan dosen universitas), sampai sekarang ini tidak ada standar tata bahasa resmi yang diterbitkan oleh INL. Sebetulnya, *Tetum Reference Grammar* ‘Petunjuk Tatabahasa Tetun’ oleh Hull dan Eccles (2001), yang terjemahannya dalam bahasa Portugis terbit pada tahun 2004, untuk sementara waktu berfungsi seperti itu.

Baik *ortografia patronizada* dan *Tetum reference Grammar* oleh Hull dan Eccles (2001) memenuhi persyaratan stabilitas. Beragam ejaan Tetun – yang mencerminkan tradisi ejaan Portugis dan Indonesia – secara resmi ditolak. Setiap ejaan alternative, di samping yang diusulkan dalam *ortografia patronizada*, dianggap sebagai ‘tulisan campuran’ (Hull, 1994), sedangkan pelafalan alternatif yang ada, terutama untuk kata pinjaman Portugis, dijelaskan oleh Hull dan Eccles (2001) sebagai varian bahasa madya atau basilek, sedangkan pelafalan asli Portugis merupakan varian akrolek. Varian berikutnya juga diidentifikasi sebagai *Tetun literáriu* ‘bahasa Tetun sastra’ yang digunakan dalam konteks gereja.

Ketakutan ‘skenario Filipina’ (Engelenhoven & Naerssen), yang masyarakatnya tidak mengaku pilihan satu bahasa lokal (misalnya bahasa Tagalog) atas yang lain sebagai bahasa nasional, mengakibatkan penerimaan semua bahasa lokal yang diidentifikasi oleh INL sebagai bahasa nasional. Konsekuensinya, di samping tugasnya untuk membakukan bahasa Tetun resmi, INL juga ditugaskan untuk mendorong semua bahasa nasional. Perhatian secara khusus diberikan pada bahasa Fataluku di Lautém dan bahasa Baikenu di Oecusse, karena distrik ini telah diakui sebagai daerah tempat bahasa Tetun belum diintroduksi. Sedangkan komunikasi resmi terbatas pada bahasa Portugis dan bahasa Tetun, orang distrik ini diberi kesempatan untuk berbicara bahasa Fataluku atau bahasa Baikenu sebagai gantinya.

Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama-sama diakui sebagai ‘bahasa kerja’ dalam Konstitusi, meskipun yang belakangan secara resmi ‘dihapuskan setahap demi setahap’ dari kehidupan masyarakat Timor-Leste (Hull, 2002). Masalah utama adalah bahwa bahasa Indonesia masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari utamanya di universitas dan Sekolah Menengah Atas, karena sebagian besar guru dan dosen dididik dalam bahasa Indonesia di lembaga pendidikan Indonesia. Karenanya, INL mengadakan workshop ortografi untuk guru dan wartawan di seluruh negara.

Status resmi bahasa Portugis dan bahasa Tetun berimplikasi bahwa kedua bahasa perlu diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan politik bahasa yang melarang penggunaan bahasa Portugis dalam masyarakat selama pendudukan Indonesia seperti dijelaskan di atas, menyebabkan situasi kekurangan guru bahasa Portugis. Sebagai anggota Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (*Comunidade dos Países da Língua Portuguesa*, CPLP), sesama anggota seperti Portugal dan terutama Brasilia segera bereaksi dengan mengirimkan materi kursus bahasa Portugis dan guru. Begitu, bahasa Portugis menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar dan menengah.

¹ Di sini *malaiu* ‘Melayu’ dengan sengaja digunakan sebagai pengganti *indonesiu* ‘Indonesia’.

2.4 Pandangan tentang bahasa di Distrik Lautém

Lautém adalah distrik paling timur di Timor-Leste dan mempunyai lima bahasa. Satu bahasa misterius, bahasa Makuva atau bahasa Lovaia adalah bahasa Austronesia yang dituturkan di subdistrik Tutuala (Engelenhoven, 2009). Tiga lainnya, bahasa Makasai (dituturkan di subdistrik Luro dan Suco Ililai, Eukisi dan Daudere di subdistrik Lautém, Hull, 2004), bahasa Makalero (dituturkan di Subdistrik Iliomar, Huber, 2011) dan bahasa Fataluku (dituturkan di tempat lain di seluruh distrik Lautém) tergolong cabang bahasa Timor rumpun bahasa Timor-Alor-Pantar yang boleh agak terkait dengan filum *Trans New Guinea* (Schapper, Huber & Engelenhoven, 2012).

Baik bahasa Makuva dan bahasa Makalero tidak membedakan dialek, sedangkan bahasa Makasai di Lautém dan bahasa Fataluku masing-masing mempunyai tiga dan lima dialek. Correia (2011:7) mengidentifikasi isolek Sokolari² di *suco*³ Ililai dan Laivai (subdistrik Lautém), Sa'ani di *suco* Lakawaa dan Baikafa (subdistrik Luro) dan Wairafi di Lakawaa (subdistrik Luro), Laivai dan Daudere (keduanya di subdistrik Lautém) sebagai dialek yang saling dimengerti di dalam varian Utara bahasa Makasai. Hull (2001) membedakan lima dialek Fataluku yang juga saling dimengerti: dialek Barat Laut, yang dituturkan di *suco* Serelau dan Baduro yang berbatasan dengan daerah berbahasa Makasai di subdistrik Lautém, dialek Utara, yang dituturkan di dan sekitar kota Lautém, dialek Sentral, yang dituturkan di dataran tinggi di subdistrik Lospalos dan Lautém, dialek Selatan, yang dituturkan di *suco* Lorehe (subdistrik Lospalos) dan dialek Timur yang dituturkan di subdistrik Tutuala. Valentim (2002), berdasarkan folklor lokal, mengusulkan isolek Cacavem (subdistrik Lospalos) sebagai dialek yang terpisah dari dialek Sentral, seperti disarankan oleh Hull (2001). Engelenhoven (2010a) mengidentifikasi satu dialek lainnya di Com (subdistrik Lautém), yang pada tahun 2007 hanya diketahui satu perempuan *semi-speaker* (penutur kurang fasih) yang berusia lanjut. Dialek ini mungkin sekarang sudah punah. Dalam makalah yang sama, Engelenhoven menginformasikan bahwa satu bahasa lain di subdistrik Tutuala, bahasa Rusenu ternyata tidak ada sama sekali atau sudah punah.

Selain bahasa daerah yang disebutkan di atas, ada beberapa bahasa lain yang digunakan di distrik ini. Bahasa Portugis adalah bahasa resmi utama, yang digunakan oleh para pejabat tinggi di berbagai departemen. Bahasa Tetun digunakan sebagai bahasa utama antara warga non-Fataluku dan para pejabat yang lebih rendah, dan antara para pejabat distrik Lautém dan pejabat luar distrik. Keduanya digunakan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai bahasa instruksi.

Meskipun peranan perantara bahasa Tetun di distrik Lautém meningkat, Hajek, Himmelmann & Bowden (2003), berpendapat bahasa Indonesia masih merupakan bahasa penghubung utama antara penutur Fataluku dan orang asing. Orang daerah Luro dan daerah berbahasa Makasai lainnya di Lautém telah dilaporkan berkomunikasi dalam bahasa Tetun dengan orang yang berbahasa Fataluku. Tidak diketahui bahasa apa yang digunakan di kalangan etnis Cina di Lautém. Hull (2004) mengidentifikasi minoritas Cina di Timor-Leste sebagai orang Hakka. Pada zaman Portugis di Lospalos ada sekolah berbahasa Cina (yang sekarang ini merupakan restoran serta hostel) tempat bahasa Mandarin diajarkan.

² Nama lainnya Sokolori

³ Pemerintahan Timor-Leste masih menggunakan beberapa istilah Portugis, seperti: *suco* 'desa', *aldeia* 'kampung' dan *povoação* 'dusun'.

Bahasa perantara antara pemilik restoran Cina dan pelanggannya adalah bahasa Tetun atau bahasa Indonesia.

2.5 Komunitas berbahasa Fataluku

Fitur distingtif pertama komunitas berbahasa Fataluku tentu saja adalah penggunaan bahasa Fataluku, dengan tujuannya untuk membedakan diri dari kelompok etnolinguistik lain di Timor-Leste. Namun demikian, bahasa Fataluku tidak dianggap sebagai bahasa asli salah satu klan. Masing-masing klan mengakui satu bahasa sendiri – yang disebut ‘bahasa sakral’ atau *luku-lukun i teinu*, yang merupakan bahasa yang dibawa nenek moyang dari luar negeri.

Engelenhoven (2010a) melaporkan bahwa klan Latuloho Ratu dan Uruha’a Ratu memiliki bahasa mereka sendiri yang disebut Nisa dan digunakan di daerah Com dan sekitarnya sebelum perang Jepang (1940-1945). Menganalisis daftar kata kecil yang dibuat Andrew McWilliam, Engelenhoven (2010a) menyimpulkan bahwa bahasa Nisa ini merupakan dialek Fataluku. Temuan ini berhubung dengan sejarah lokal, yakni klan Latuloho Ratu memaksakan bahasanya kepada klan lain sebagai ‘bahasa yang benar’ (*Fata Luku*) setelah mengalahkan klan Cailoro Ratu yang mengakui bahasa Makuva sebagai ‘bahasa sakral’. Keterbatasan bahasa terakhir ini di subdistrik Tutuala pada umumnya ditafsirkan sebagai bukti perang klan tersebut.

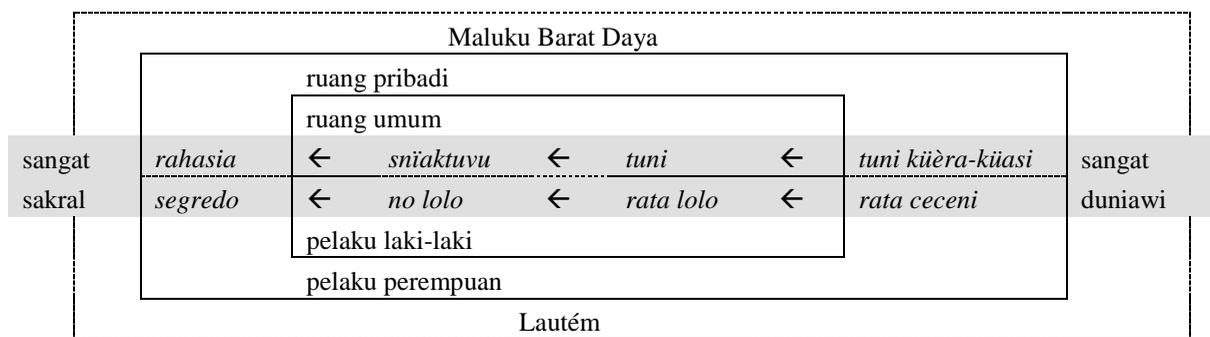
Ada beberapa catatan lain tentang bagaimana bahasa Fataluku diperkenalkan di wilayah tersebut. Klan Naja Ratu, misalnya, menginformasikan bahwa bahasa aslinya menghilang selama perjalanan dari tempat asalnya ke Timor, sehingga diputuskan *hair na’u fata ca’a* ‘mulai sekarang berbicara secara benar’.

Klan asli Kati Ratu dan Tutuala Ratu mengakui bahasa Makuva rumpun Austronesia sebagai bahasa aslinya sebelum introduksi bahasa Fataluku (Engelenhoven, 2010a). Tetapi, mungkin ialah status mereka sebagai klan tertua atau pertama di wilayah tersebut yang membentuk ide bahwa bahasa Makuva digunakan mereka sebagai bahasa pertama. Klan Cailoro terkenal karena penggunaan bahasa Makuva dalam ritual penguburannya, bahkan di luar subdistrik Tutuala. Dengan kata lain, penggunaan bahasa Makuva agak terkait dengan tradisi lisan.

Engelenhoven (2010b) menggunakan teori Straver (1993) tentang tipologi tradisi lisan Maluku dan membagi tradisi lisan Fataluku ke dalam skala yang pada satu ujungnya ada ragam mengidung, sedangkan di ujung lainnya ada ragam bercerita. Setiap ragam ada dua genre. Tradisi lisan nyanyian dibagi lagi dalam *vaihoho* dan *mamunu*. Yang terakhir adalah kata klise yang dinyanyikan dengan kekuatan sakral dan medisinal. *Vaihoho* adalah lagu polifoni yang terdiri dari paralel leksikal. Penelitian yang sedang dilakukan Dana Rappaport (2010) menunjukkan hubungan historis dengan polifoni yang terdapat dalam bahasa Austronesia Flores Timur dan kepulauan Solor di sebelah utara pulau Timor, yang merupakan satu-satunya daerah saja di seluruh kepulauan Asia Tenggara yang ada jenis nyanyian ini. Tradisi lisan cerita dibagi lagi dalam *no lolo* sakral (yang menceritakan tentang mitos masa lalu) dan *rata lolo* duniawi (yang menceritakan tentang hari yang lalu).

Teori awal Engelenhoven (2010b) tentang tata bercerita menggambarkan bahwa tradisi lisan di Lautém dan kabupaten Maluku Barat Daya di Indonesia serupa. Hal ini diuraikan pada tahun 2013 dengan

membandingkan kisah epik Fataluku dengan kisah epik Maluku Barat Daya tentang cerita kehancuran dunia oleh makhluk laut yang besar. Dalam teori ini pertunjukan sakral dan duniawi terletak di ujung skala kesakralan kalau diperlihatkan dalam gambar dua dimensi (Gambar 2.1). Namun, dalam sebuah penggambaran tiga dimensi, kedua ujungnya akan saling mempersambungkan, yang secara tepat menunjukkan bahwa batas yang diasumsikan antara pertunjukan sakral dan duniawi ternyata agak samar-samar. Pada gambar di bawah ini, yang disalin dari Engelenhoven (2013) tanpa perubahan, kotak luar dibentuk oleh garis titik-titik mewakili daerah tersebut, dengan di sisi atas Maluku Barat Daya dan di sisi bawah Lautém. Di dalam kotak garis titik-titik ada kotak lain yang mewakili ruang pribadi cerita dan dalam kotak yang terakhir masih ada kotak lain yang merupakan ruang umum. Kedua kotak dibelah oleh garis titik-titik. Terminologi di atas garis titik-titik adalah kata Leti dan mewakili terminologi Maluku Barat Daya, sedangkan di bawah garis titik-titik adalah pasangannya Fataluku yang merupakan pembatasan penulis di sini. Bagian abu-abu yang melintasi semua kotak merupakan skala yang dapat dikategorikan sebagai kesakralan cerita.



Gambar 2.1: Tata bercerita di Maluku Barat Daya dan Lautém (Sumber: Engelenhoven, 2013)

Seperti dapat dilihat pada gambar, ada dua jenis ruang: ruang pribadi cerita yang sangat sakral dan duniawi dan ruang umum cerita yang kurang sakral dan duniawi. Analisis Engelenhoven lebih kurang menyiratkan bahwa prototipe pelaku di ruang pribadi selalu adalah perempuan (sebagusnya ibu atau nenek). Dalam pandangan penulis, meskipun begitu, prototipe pelaku dalam tata bercerita Fataluku selalu adalah laki-laki. Pengamatannya bahwa pelaku di ruang pribadi adalah seorang perempuan sebenarnya beralasan ketidakadaan pelaku laki-laki.

Berkurangnya kesakralan di ruang umum seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 dijelaskan oleh fakta bahwa performa berlangsung di ruang umum. Dengan kata lain, informasi pribadi sebuah klan – rahasia – tidak boleh diucapkan di ruang umum. Gambar 2.1 juga menunjukkan bahwa di kedua daerah sebuah kata asing digunakan untuk menunjukkan kerahasiaan, dalam kasus Fataluku istilah *segredo*, yang merupakan kata Portugis untuk ‘rahasia’.

Teori tata bercerita yang dijelaskan di atas juga berlaku untuk bernyanyi di Lautém. Meskipun *vaihoho* seharusnya dinyanyi di ruang umum, *mamunu* terbatas pada ruang sakral dan biasanya dinyanyikan

dalam Lautém.⁴ Ini kurang lebih berarti bahwa hanya pelaku yang dianggap pandai memahami isi *mamunu* tersebut. Penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa secara tidak sengaja saksi pertunjukan *mamunu* akan segera menjauhkan diri untuk mencegah pelanggaran di ruang pribadi orang lain.

Alat puitis utama dalam tradisi lisan Fataluku adalah paralelisme leksikal – pasangan item leksikal, yang pada umumnya dikenal sebagai fitur Austronesia di daerah tersebut (Klamer, 2002). Tetapi Engelenhoven (2010b) menunjukkan bahwa paralelisme leksikal Fataluku harus dipelajari secara tersendiri dan menyimpang dari yang terdapat dalam bahasa Austronesia di sekitarnya seperti bahasa Roti di ujung Timor Barat serta bahasa Leti. Studi ini membahas kata benda dalam bahasa Fataluku yang pasangan leksikalnya dibagi lebih lanjut dalam kelompok yang: a) berhubungan dengan ukuran: kata benda yang mengacu pada entitas yang lebih kecil mendahului kata benda yang mengacu pada entitas yang lebih besar (contoh: *pua // vata* ‘sirih // kelapa’), b) berhubungan dengan jenis kelamin: kata benda yang mengacu pada perempuan mendahului kata benda yang mengacu pada laki-laki (contoh: *tupuru // nami* ‘perempuan // laki-laki’) dan c) berhubungan dengan perbedaan darat – laut (contoh: *mu’a // tahi* ‘tanah // laut’). Kelompok terakhir ini tampaknya unik untuk bahasa Fataluku dan tidak terdapat dalam salah satu bahasa di sekitarnya. Walaupun tidak dibahas dalam studi di atas, paralelisme leksikal tidak terbatas pada kata benda dalam bahasa Fataluku, tetapi juga terdapat dalam kategori kata lain seperti kata kerja, kata sifat dan kata keterangan. Sebuah contoh teks *no lolo* yang diambil dari Costa Meneses (1997) menonjolkan paralelisme leksikal yang ditampilkan dalam teks di bawah ini. Semua pasangan leksikal dalam teks Fataluku asli dicetak tebal di sebelah kiri dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dicetak tebal di sebelah kanan.

FRAGMEN Tuan Kain Emas

*Hah, no mo hin la’a nara //
rata mo hin la’a nara.*

*Ia mari uku mohove //
tulua uku mohove.*

*Maraki uku mohove //
catani uku mohove.*

*Ha, marak uku mohoven hai la’a //
catan uku mohoven hai la’a.*

*Marak in hai i nate //
catan in hai i nate.*

*Risato hin la’a //
Hai Pauvali hin la’a.*

Hah, jika kamu pergi ke pondok **kuno** //

Jika kamu pergi ke pondok **lama**.

Berjalanlah ke semua **jejak kaki** //

Berjalanlah ke semua **jalan setapak**.

Berjalanlah ke semua **markah** //

Berjalanlah ke semua **tanda**.

Ha, berjalan ke semua **markah** //

Berjalan ke semua **tanda**.

Berdirilah di **markah** itu //

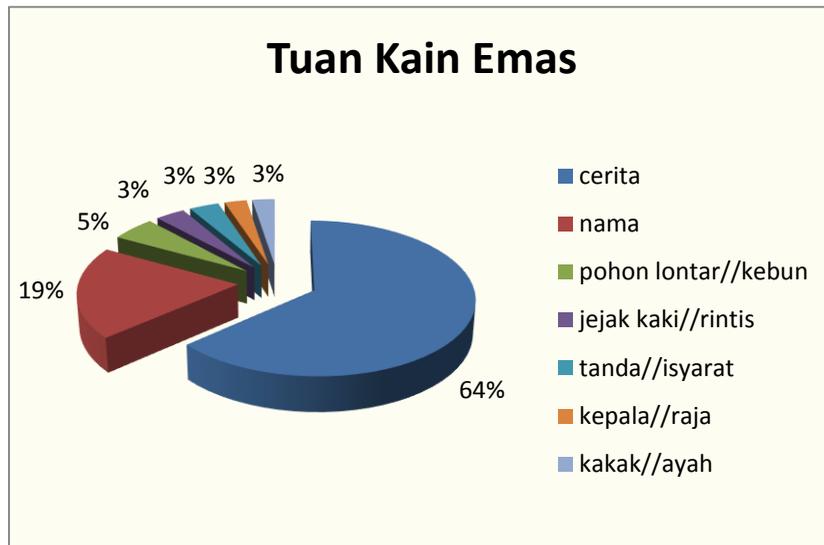
Berdirilah di **tanda** itu.

Pergilah ke milik **Risato** //

Pergilah ke milik **Pauvali**.

⁴ Sebuah pengecualian adalah Costa Meneses (1997) yang menganalisis *mamunu* dalam bahasa Fataluku. Ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa *mamunu* yang dibahas, sebenarnya bukan *mamunu* sama sekali (karena analisisnya melanggar prinsip kesakralan), atau bahwa dalam klan pengarang *mamunu* memang dinyanyikan dalam bahasa Fataluku, yang menimbulkan kesan bahwa ada klan berbahasa Fataluku yang tidak memiliki Lautém.

Seperti kebanyakan bahasa Timor lainnya, paralelisme leksikal terbatas pada bahasa ritual. Engelenhoven (2010b) menyebutkan tiga fungsi pragmatis paralelisme leksikal di daerah Lautém-Maluku Barat Daya: a) untuk mensinyalir karakter ritual teks, b) untuk mensinyalir kebenaran historiografi, c) untuk memastikan kecendekiaan pelaku. Oleh karena itu, dalam ideologi bahasa Fataluku, bahasa resmi di ruang umum harus terdiri dari paralel leksikal agar diterima publik. Namun, Engelenhoven (2010b) memperlihatkan secara meyakinkan bahwa pada kenyataannya persyaratan paralelisme leksikal menghambat pada pemahaman yang baik dan penyampaian pesan. Hal ini ditunjukkan dalam Gambar 2.2 mengenai *no lolo* ‘Tuan Kain Emas’ yang 36% seluruh teksnya digunakan untuk hiasan sehingga 64% cuma tersisa untuk narasi yang sebenarnya.



Gambar 2.2: Paralelisme leksikal dalam syair *no lolo* (Sumber: Engelenhoven, 2010b)

Dalam skenario bahasa yang terancam punah, seperti situasi bahasa Fataluku, kurangnya penguasaan atas seni verbal Fataluku secara otomatis berarti pidato umum oleh petugasnya harus dilakukan dalam bahasa lain daripada bahasa Fataluku, meskipun dalam pertemuan tradisional seperti pemakaman dan pernikahan atau pertunjukan oleh otoritas lokal di ruang umum, penggunaan bahasa Fataluku dan paralelisme leksikalnya yang konsekuen sangat dihargai.

Munculnya fenomena ‘Lautém’ menunjukkan bahwa dahulu komunitas penutur Fataluku masih menonjolkan diglosia yang diperluas oleh karena bahasa aslinya yang dibawa oleh klan, misalnya Naja ratu, berfungsi sebagai varian tinggi dan bahasa Fataluku lebih mirip sebuah *lingua franca* untuk kontak antar-klan.

Munculnya paralelisme leksikal sendiri dalam tradisi lisan Fataluku, di pihak lain, menunjukkan bahwa pemaksaan penggunaan bahasa Fataluku di semua klan yang diceritakan menciptakan masyarakat diglosia klasik dengan paralelisme leksikal menjadi fitur khususnya varian tinggi. Bagaimanapun juga pengenalan bahasa Portugis dan bahasa Tetun sebagai bahasa resmi dengan cepat mengubah kembali masyarakat penutur menjadi masyarakat diglosia yang diperluas yang bahasa resminya berfungsi

sebagai varian tinggi dan bahasa Fataluku sendiri semakin turun menjadi varian rendah tanpa paralelisme leksikal sama sekali (Engelenhoven, 2006).

2.6 Kesimpulan

Engelenhoven (2014) menyimpulkan bahwa dalam penelitian tentang sikap berbahasa, sebenarnya ideologi bahasa, cara penutur berpikir tentang bahasa yang digunakan untuk berbicara, perlu dibedakan dari folklor bahasa, ide seseorang tentang bahasa yang tidak dikuasainya, seperti dalam kasus bahasa Petjoh, sebuah jenis bahasa tersangka yang dulu digunakan oleh orang campuran keturunan Indonesia-Belanda yang lebih tepat digambarkan sebagai varian bahasa Melayu daripada varian bahasa Belanda. Inti argumennya adalah bahwa sebenarnya tidak ada penutur asli bahasa ini dan bahwa semua informasi yang dikumpulkan sebenarnya lebih imajinatif daripada fakta nyata. Lautém tampaknya kasus serupa dengan ‘Lautém’ yang sebenarnya cuma boleh dimengerti oleh sebuah kelompok spesialis khusus (yang disebut *navarana*). Penanganan cermat oleh pengamat bahasa Fataluku atas fenomena ini menunjukkan bahwa sebenarnya cuma bahasa Makuva adalah contoh asli ‘Lautém’, karena bahasa Nisa yang disebutkan di atas tampaknya dialek Fataluku saja. Dengan kata lain, folklor bahasa Fataluku menekankan pandangan bahwa bahasa merupakan penampung makna, dan oleh sebab itu ‘Lautém’ perlu disembunyikan dari orang luar, karena berisi makna rahasia. Pada saat yang sama ideologi bahasa Fataluku juga menekankan bahwa bahasa Fataluku – sebagai bahasa yang benar – perlu dibina supaya melindungi masyarakat Fataluku terhadap pengaruh berbahaya dari luar. Sedangkan bahasa eksternal seperti bahasa Portugis dan bahasa Tetun hanya dapat dianggap sebagai ‘asing’ dan karena itu seperti fenomena ‘buruk’, ialah kekalahan berkelanjutan bahasa Fataluku dalam masyarakat yang menyebabkan pemakaian bahasa aneh sebagai fenomena yang tidak terelakan dan berkaitan dengan hilangnya identitas kultural seluruhnya. Kebutuhan memperkenalkan keberaksaraan Fataluku, pengembangan bahan bacaan Fataluku dan permulaan sastra Fataluku dapat dilihat sebagai upaya untuk menghentikan bahaya ini.

2.7 English abstract

Chapter 2 discusses the language policy in Timor-Leste and specifically in Lautém District.

Section 2.1 informs that Timor-Leste is part of the so-called East Nusantara region that features both Austronesian and non-Austronesian languages. Fataluku belongs to an exclusive non-Austronesian language family that is located on the islands of Timor, Alor and Pantar.

Section 2.2 discusses language policy in East Timor during Portuguese and Indonesian times. Since Portugal only became interested in East Timor after the Second World War, there are only a few Portuguese publications on Timorese languages that date before 1940. These publications mainly served the spreading of the Roman-Catholic faith. Father Fernandes’ (1964) small learners’ grammar is the first study of Tetum that was the contact language within the Portuguese colonial army, albeit that Portuguese remained the official language of the colony. This language policy created an extended diglossia in which the local languages function as the low variants and Portuguese as the high variant in formal contexts. Only after the colonial administration moved from Lifau to Dili, Tetum began to function as an interethnic *lingua franca*. Since it had a comparable position as Malay in Indonesia, the Tetum variant

in Dili was a logical choice as the national language in a premeditated independent East Timor. However, the absence of a literary heritage motivated FRETILIN to rather opt for Portuguese as the national language in their national language program. The abolition of Portuguese in East Timorese society during the Indonesian occupation caused it to become the language of underground resistance, whereas the confirmation by The Vatican of Tetum as liturgical language endorsed the latter as the language of resistance ‘above ground’.

Section 2.3 elaborates on the language policy of Timor-Leste. During the UNTAET administration (1999-2002) Tetum became acknowledged as an official language next to Portuguese. Beside the absence of a literary heritage, two other diglossic features are mentioned that weaken the position of Tetum as an official language: its low prestige and its perceived instability. In order to counter these three features, the National Institute of Linguistics (INL) was established whose primary task is to standardize the Dili variant of Tetum into Official Tetum. The publication of a monolingual Tetum dictionary and the development of the official standard spelling of Tetum were specifically meant to meet the prestige and stability requirements. All 15 local languages identified by INL are acknowledged as national languages. Since Portuguese and Tetum are still reported to be unfamiliar to many people in Oecusse and Lautém, inhabitants in these districts are for the time being exempted from the use of the co-official languages in official contexts and may use Baikenu and Fataluku instead. Portuguese in general is little known in Timor-Leste’s society, due to the Indonesian abolition strategy. As a member of the Community of Lusophone Nations, Timor-Leste is working hard to reintroduce Portuguese in society by making it a mandatory subject in primary and secondary school.

Section 2.4 discusses the literature dealing with the five languages of Lautém District. However, one of these languages, Rusenu, seems to be already extinct. Makuva is the only indigenous Austronesian language and it is spoken in Tutuala subdistrict. Makalero is spoken in Iliomar subdistrict and Makasai in the subdistricts of Lautém (also referred to as Moro) and Luro. Fataluku is spoken throughout Lautém District, except in the districts of Luro and Iliomar. The latter three languages constitute a separate branch of the Timor-Alor-Pantar language family that eventually may be linked to the Trans New Guinea Phylum. Whereas Makalero and Makuva do not distinguish dialects, Makasai in Lautém and Fataluku distinguish two and seven dialects, respectively. Beside these languages, Tetum and Indonesian are reported to be used as an interethnic contact language in this region. Portuguese is confined to high officials in administrative contexts. In Portuguese times, Lospalos had a Chinese school where Mandarin was taught.

Section 2.5 deals with the literature about the Fataluku speech community. The Fataluku language functions primarily as a means for the speech community to distinguish itself from other ethnolinguistic groups in Timor-Leste. Albeit that each clan is supposed to have its own sacred language, one of these sacred languages, Nisa, has been identified as a Fataluku dialect. This supports local tradition that states that Fataluku was introduced in the region by the Latuloho Ratu clan. Oral traditions are classified on a gliding scale from pure storytelling to pure singing. Just as polyphonic *Vaihoho* may be linked to a similar song type in East Flores and the Solor Archipelago North of Timor Island, Lautém and Southwest Maluku to the East of Timor Island share the same epic storytelling traditions. In performance both oral traditions – storytelling and singing – are classified along a scale from highly sacred to completely

profane. The main poetical instrument in Fataluku oral traditions is lexical parallelism, the pairing of words. It is confined to ritual speech and has three pragmatic functions: (a) signaling the ritual character of the text, (b) signaling historiographical truth and (c) the scholarship of the performer. The existence of a ‘sacred language’ indicates that the initial Fataluku speech community featured an extended diglossia where clan languages rather functioned as high variant and Fataluku as a contact language among clans. The existence of lexical parallelism in Fataluku shows that the imposition of Fataluku on all clans created a rather classic diglossia. The introduction of Portuguese and Tetum changes Fataluku diglossia back into an extended diglossia where Fataluku has become the low variant.

Section 2.6 provides conclusions based on this literature review chapter. Language ideology – the way one thinks about the language one speaks – needs to be distinguished from language folklore – the way one thinks about a language one does not speak. ‘Sacred languages’ are supposed to be known only to a small group of specialists and ought to be hidden from the outside world. Fataluku language ideology requires the development of Fataluku, since it shields the Fataluku society from dangerous outside influences. The introduction of ‘outsider languages’ as Portuguese and Tetum, therefore, seems in principle poorly appreciated in Fataluku language ideology, because it endangers the Fataluku cultural identity.